

TERNATE
Kota Rempah



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia, rahmat dan petunjukNya sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sepanjang tahun 2023 dan dapat pula merampungkannya dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate ini.

Adalah suatu kewajiban bagi seorang Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate pada akhir tahun anggaran sebagaimana diamanatkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara objektif diakui terdapat berbagai kemajuan dan keberhasilan di berbagai aspek pada tahun 2023 ini, namun disadari Kota Ternate juga masih diperhadapkan dengan sejumlah permasalahan perkotaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, seperti permasalahan banjir, pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemerataan infrastruktur pada kawasan terpencil, belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana jasa dan perdagangan serta permasalahan standar pelayanan minimal dan permasalahan perkotaan lainnya. Untuk itu secara berkelanjutan dalam tahun kelima kebijakan yang telah diakomodir dalam APBD 2023 berdasarkan Program Prioritas dalam RPJM, diarahkan pada upaya menangani sejumlah permasalahan tersebut, Insya Allah secara bertahap kita dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Kepada segenap jajaran aparaturn pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kota Ternate, Saya menaruh harapan besar agar senantiasa memacu akselerasi pembangunan di berbagai sektor kehidupan untuk mewujudkan **Visi “MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”** dalam tatanan kehidupan yang insya Allah lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai segala hasil kerja kita dan memberikan petunjuk serta kekuatan kepada kita dalam mengemban amanat dan tanggung jawab untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Ternate, Maret 2023

WALIKOTA TERNATE

DR. M TAUHID SOLEMAN, M.SI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap penyelenggara pemerintahan membuat laporan kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bentuk laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah melalui laporan kinerja yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

1.2 MAKSUD Dan TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023 dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Ternate dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kota Ternate kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Ternate.

1.3 GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE

1.3.1 Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 (Tiga) Kecamatan dan 58 (Lima Puluh Delapan) Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 (Empat) Kecamatan selanjutnya tahun 2009 dimekarkan kembali menjadi 7 (Tujuh) Kecamatan. Di tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016, Kota Ternate berkembang menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan Kecamatan Ternate Barat sebagai Kecamatan baru, pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate. Kota Ternate merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 8 (Delapan) Pulau dan 78 (Tujuh Puluh Delapan) Kelurahan yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan di Kota Ternate.

Tabel 1.1
Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan serta Ibukota
Kecamatan di Kota Ternate

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibukota Kecamatan
1	Ternate Selatan	17	Kalumata
2	Ternate Tengah	16	Salahudin
3	Ternate Utara	14	Dufa-Dufa
4	Ternate Barat	7	Sulamadaha
5	Pulau Ternate	6	Jambula
6	Pulau Hiri	6	Faudu
7	Pulau Moti	6	Moti Kota
8	Pulau Batang Dua	6	Mayau
Jumlah		78	

1.3.2 Luas Wilayah dan Letak Geografis

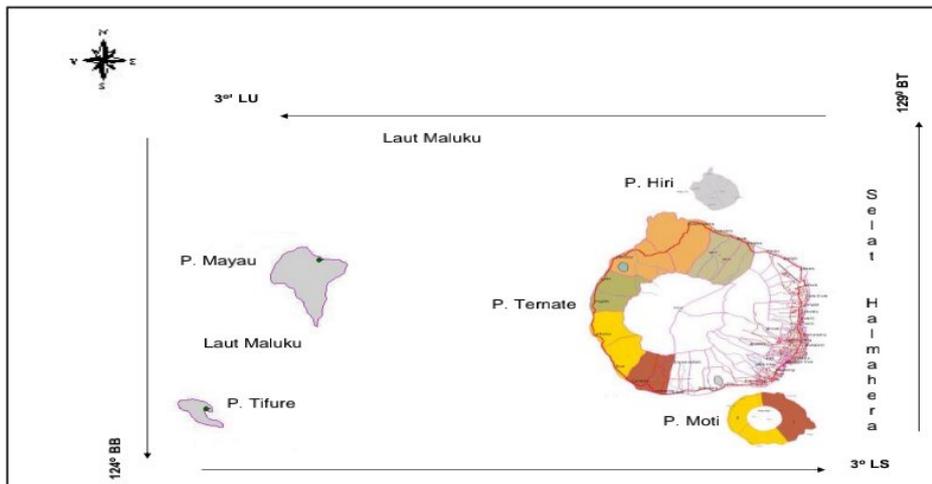
Wilayah Kota Ternate berada pada $0^{\circ}25'41,82''$ - $1^{\circ}21'21,78''$ Lintang Utara dan antara $126^{\circ}7'32,14''$ - $127^{\circ}26'23,12''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.709,72 Km² dan didominasi oleh wilayah laut 5.547,55 Km² sedangkan luas daratan 162,17 Km². Kota Ternate berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Sebelah Timur dengan Pulau Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku dan Pulau Sulawesi.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 (Delapan) Pulau, meliputi :

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure
6. Pulau Maka
7. Pulau Mano
8. Pulau Gurida

GAMBAR 1.1 PETA KOTA TERNATE



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Ternate

1.3.3 Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung dan berbukit, yang terdiri dari pulau vulkanis dan Pulau Karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut:

1. Rogusal :
 - Pulau Ternate
 - Hiri
 - Moti
2. Rensika :
 - Pulau Mayau
 - Pulau Tifure
 - Pulau Maka
 - Pulau Mano
 - Pulau Gurida

1.3.4 Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya Daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (Utara - Barat dan Timur - Selatan) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba

disetiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut yaitu:

- Rendah : 0-499 M ;
- Sedang : 500-699 M, dan
- Tinggi : lebih dari 700 M

Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 (Delapan) pulau, 5 (Lima) pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan Pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, pulau Mano dan Pulau Gurida tidak berpenghuni.

1.3.5 Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2023 sebanyak 210.636 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 8 (Delapan) Kecamatan, yaitu wilayah Kecamatan Ternate Selatan 71.140 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 61.685 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 48.876 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Barat 9.226 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 8.463 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 5.120 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 3.306 jiwa, dan wilayah Kecamatan Batang Dua 2.820 jiwa.

1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, sampai dengan akhir tahun 2023 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) 23 (dua puluh tiga) Organisasi Dinas Daerah;
- 4) 6 (enam) Organisasi Badan Daerah;
- 5) 1 (satu) Inspektorat;
- 6) 1 (satu) Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

- 7) 2 (dua) Perusahaan Daerah;
- 8) 8 (delapan) Organisasi Pemerintah Kecamatan ;
- 9) 78 (tujuh puluh delapan) Pemerintah Kelurahan.

Tipe perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah Kota Ternate Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Kota Ternate Tipe B;
- 3) Inspektorat Kota Ternate Tipe A;
- 4) Dinas Pendidikan Kota Ternate Tipe A;
- 5) Dinas Kesehatan Kota Ternate Tipe A;
- 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Tipe A;
- 7) Dinas Kebudayaan Kota Ternate Tipe A;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Tipe B;
- 9) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tipe A;
- 10) Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate Tipe A;
- 11) Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate Tipe A;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Tipe A;
- 13) Dinas Pertanian Kota Ternate Tipe A;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tipe A;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Tipe A;
- 16) Dinas Pariwisata Kota Ternate Tipe A;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Tipe A;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tipe A;
- 19) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tipe A;
- 20) Dinas Perhubungan Kota Ternate Tipe A;
- 21) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Ternate Tipe B;
- 22) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tipe A;
- 23) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate Tipe A;
- 24) Dinas Sosial Kota Ternate Tipe A;

- 25) Dinas Kebakaran Kota Ternate Tipe A;
- 26) Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tipe B;
- 27) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate Tipe A;
- 28) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tipe A;
- 29) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate Tipe A;
- 30) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate Tipe A;
- 31) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tipe A;
- 32) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Tipe A;
- 33) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate Tipe A;
- 34) Kecamatan Kota Ternate Selatan Tipe A;
- 35) Kecamatan Kota Ternate Tengah Tipe A;
- 36) Kecamatan Kota Ternate Utara Tipe A;
- 37) Kecamatan Kota Ternate Barat Tipe A;
- 38) Kecamatan Pulau Ternate Tipe A;
- 39) Kecamatan Pulau Hiri Tipe A;
- 40) Kecamatan Pulau Moti Tipe A;
- 41) Kecamatan Pulau Batang Dua Tipe A;

1.5 KEPEGAWAIAN

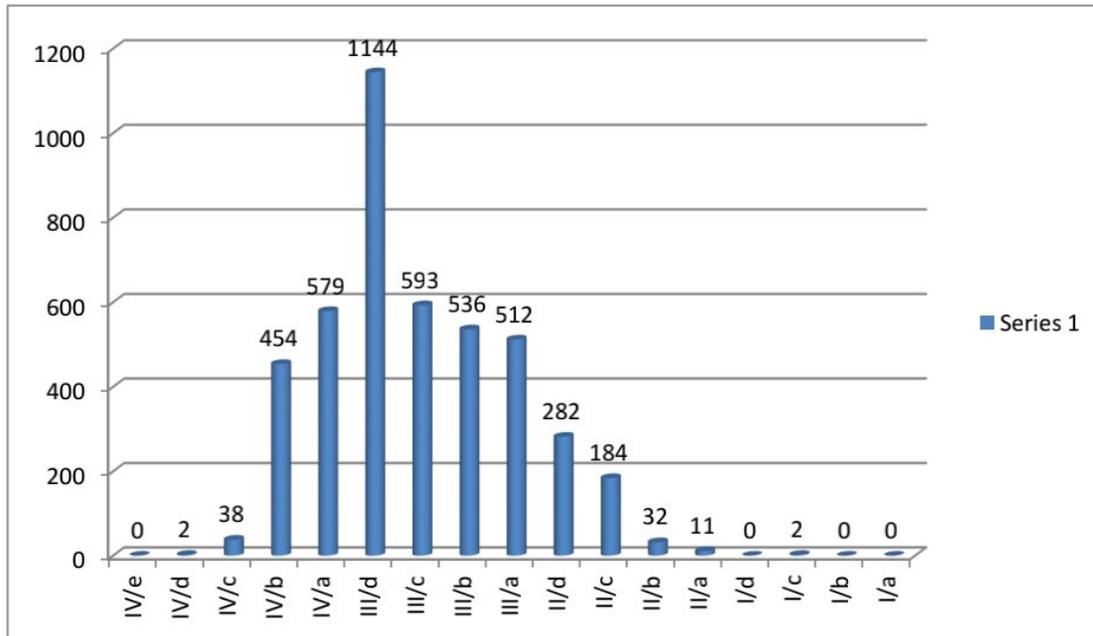
Sampai dengan akhir 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Ternate sebanyak 4369 orang yang terdiri dari Laki-laki 1554 orang dan Perempuan 2815 orang, perinciannya pada tabel dibawah ini :

Tabel : 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

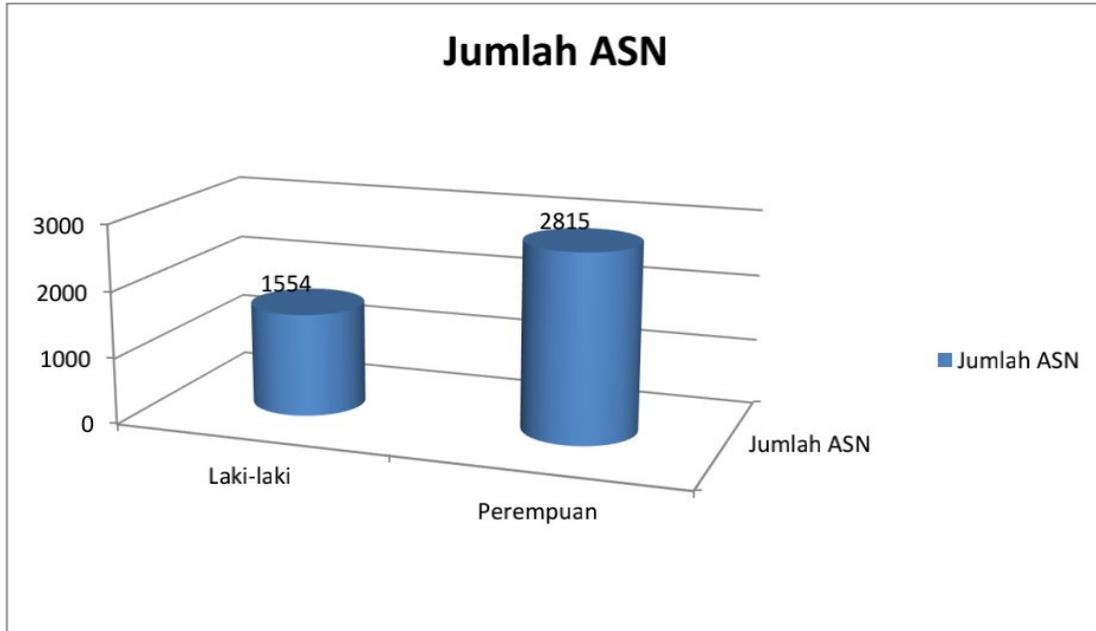
No	Golongan Kepangkatan	Pegawai Negeri Sipil		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/e	-	-	-
2	IV/d	2	-	2
3	IV/c	24	14	38
4	IV/b	142	312	454
5	IV/a	195	384	579
6	III/d	341	803	1144
7	III/c	200	393	593
8	III/b	174	362	536
9	III/a	201	311	512
10	II/d	136	146	282
11	II/c	103	81	184
12	II/b	24	8	32
13	II/a	10	1	11
14	I/d	2	-	2
15	I/c			
16	I/b	-	-	-
17	I/a	-	-	-
Total		1554	2815	4369

Sumber: BKPSDMD Kota Ternate 2023

Grafik: 1.1
Persentase ASN Kota Ternate Berdasarkan Golongan



Grafik : 1.2
Persentase Jumlah Pegawai Perempuan dan Laki-Laki
Kota Ternate Tahun 2023



1.6 KEWENANGAN

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Ternate

No	URUSAN PEMERINTAHAN	KETERANGAN
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	-
6	Sosial	-
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
8	Perhubungan	-
9	Komunikasi dan Informatika	-

10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
11	Penanaman Modal	-
12	Kepemudaan dan Olahraga	-
13	Persandian	-
14	Kebudayaan	-
15	Perpustakaan	-
16	Kearsipan	-
C. Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan dan Kelautan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	-
6	Perindustrian	-

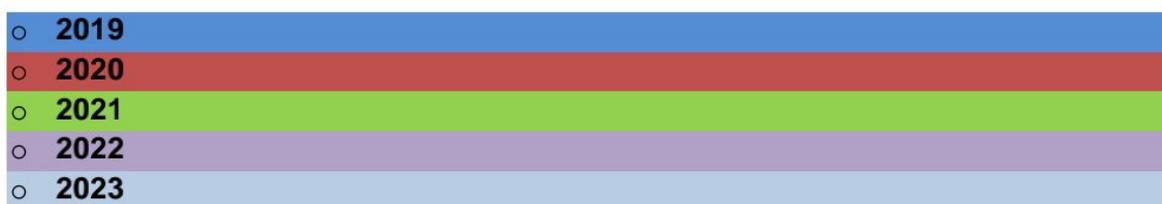
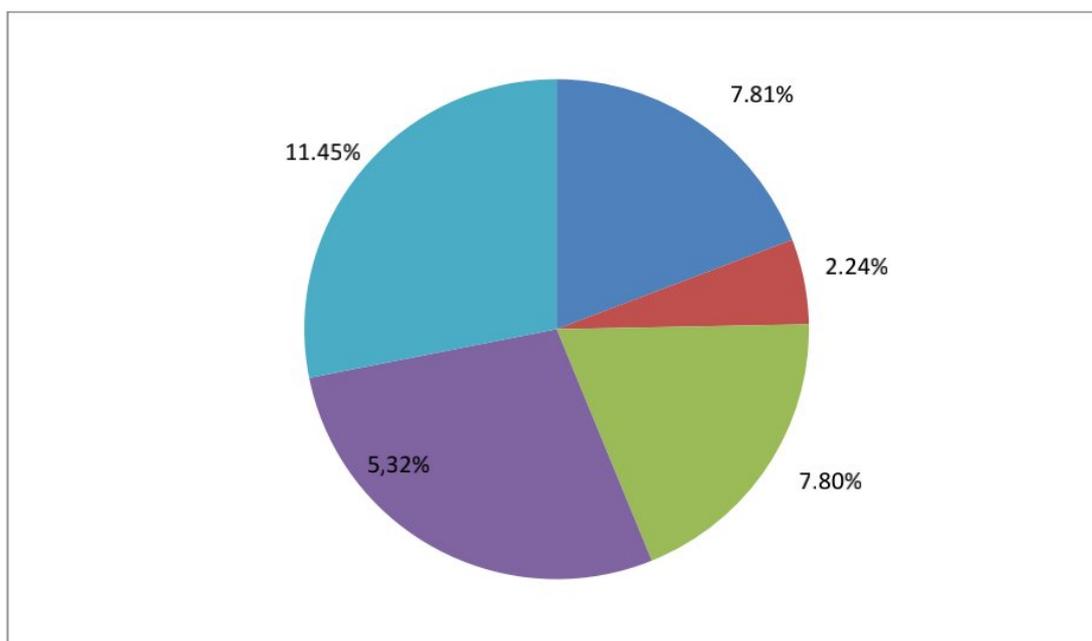
1.7 PERTUMBUHAN EKONOMI

Track record pertumbuhan ekonomi Kota Ternate 5 (Lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2019 mencapai 2,24%, tahun 2020 sebesar 7,8%, tahun 2021 sebesar 11,41% dan Tahun 2022 sebesar 5,32, serta Tahun 2023 sebesar ... produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp..... Milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. Milyar.

Target pertumbuhan ekonomi Ternate yang tinggi tahun 2023 dapat dicapai dengan adanya kondisivitas wilayah seperti stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam pengembangan usaha. Selain itu juga tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas serta memadainya infrastruktur transportasi barang, jasa, kapital serta aksesibilitas komunikasi dan informasi. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi

tersebut mendorong tumbuhnya pendapatan perkapita di Kota Ternate. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar Rp. Milyar.

Grafik : 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate
Tahun 2019 S/D Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsa serta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam 5 (Lima) tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah **"MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN" - TERNATE ANDALAN –**

Penjelasan Visi:

1. Ternate Mandiri

Dalam RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya.

Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah; untuk membangun pemerintah daerah yang mandiri mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kota Ternate yang menunjang proses pelayanan dan pembangunan infrastruktur fisik dan digital kota Ternate, dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan layanan publik yang

berkesinambungan, dengan menumbuh-kembangkan lembaga sosial dalam bingkai 7 (Tujuh) nilai dasar kebudayaan Ternate. Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Mandiri dan Berkeadilan

Dalam RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa berkeadilan dapat diartikan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang atau dengan definisi lain terkait dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan 'basis necessities' (kebutuhan dasar) kehidupan. Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam perlindungan dan konsistensi perlindungan hukum, partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya. Supaya tercipta keadilan bagi masyarakat Kota Ternate, diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin atau kaya, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, cacat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lain-lain pelayanan dasar.

Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun tanpa diskriminasi, setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan hukum, serta mampu memberikan perlindungan masyarakat yang kurang mampu dan memberikan ruang tumbuh kembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.

2.2 Misi

Secara umum, misidapat dirumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the choosen track) bagi Pemerintah Kota Ternate, dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan akitifitas pembangunan pada umumnya bagi pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat bagi setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ke-delapan rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate di tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Ekstraktif dan Responsif.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 (Tujuh) Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi).
5. Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi.
6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
7. Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
8. Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.

Seluruh misi tersebut merepresentasikan kebutuhan pembangunan yang diformulasikan pada visi pembangunan daerah. Penjabaran 8 butir misi dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Upaya pengembangan ekonomi daerah menjadi proses pembangunan yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tepat sasaran serta bertujuan untuk membuka keterisolasian. Kota Ternate, hingga saat ini

masih adanya pertumbuhan yang tidak seimbang karena masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan dan konsentrasi sentra perdagangan hanya berada di pusat kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, tingkat pengendalian inflasi yang masih belum berkualitas dan adanya potensi ekonomi kreatif yang belum diberdayakan. Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, diantaranya kendala geografi, kendala transportasi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan antar kawasan yang seimbang; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian laju inflasi, dengan sasaran terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan optimalnya pengendalian inflasi.

2.2.2 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstratif dan responsif

Tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif menjadi bagian yang paling terpenting dalam mengarahkan kebijakan yang terintegritas. Selama ini, Kota Ternate masih belum mengoptimalkan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, masih adanya budaya yang patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja. Misi ini bertujuan untuk menghilangkan budaya patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik; optimalnya implementasi manajemen ASN; meningkatnya

akuntabilitas kinerja; optimalnya penerapan zona integritas; meningkatnya akuntabilitas keuangan dan meningkatnya akuntabilitas pendapatan daerah.

2.2.3 Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Untuk mencapai Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan, maka salah satu hal yang harus diupayakan peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selama ini, kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme yang masih kuat yang mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan. Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius. Dalam hal pelayanan kesehatan upaya peningkatan kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi perhatian utama, antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, Pemerintah Kota Ternate akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan publik. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik, dengan sasaran optimalnya kualitas pelayanan publik (smart governance); meningkatnya mutu

pendidikan Kota Ternate; optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan, serta optimalnya capaian keluarga sehat.

2.2.4 Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi)

Kota Ternate sebagai kota yang heterogen, dari perbedaan agama, etnis dan budaya, akan melestarikan dan mempertahankan asset dan identitas kota, melalui menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi), yang terdiri dari:

- 1) Adat se Atorang;
- 2) Istiadat se Kabasarang;
- 3) Galib se Lakudi;
- 4) Cing se Cingare;
- 5) Bobaso se Rasai;
- 6) Ngale se Cara; dan
- 7) Sere se Duniru.

Kota Ternate belum secara menyeluruh mengoptimalkan dan menumbuhkembangkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan lembaga sosial dan budaya lainnya. Kota Ternate juga menjadi anggota jejaring kota kreatif nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi, apabila di kolaborasikan pada potensi kearifan lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Ternate berbasis lokal. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Dan jika ditelaah lebih jauh lagi, Kota Ternate harus tetap dapat merawat dan menjaga nilai-nilai kultur Ternate dalam interaksi sosial masyarakat dan lembaga. Misi ini bertujuan untuk menyediakan lembaga dan informasi kearsipan sejarah, sosial dan budaya, dengan sasaran optimalnya peran lembaga sosial budaya – Kesultanan Ternate, meningkatnya intensitas event

seni dan budaya yang diselenggarakan dan optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga.

2.2.5 Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan adanya kesempatan berekonomi, sehingga upaya memberikan hak untuk masyarakat kota dalam berekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan akan ditingkat dan disebar secara merata, adil dan proporsional. Misi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana sektor informal, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.

2.2.6 Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan

Pemerintah dan masyarakat Kota Ternate, saat ini dihadapkan pada pemenuhan layanan masyarakat. Konsistensi pelayanan sebagai norma dari sebuah kebijakan pemerintahan daerah. Semua warga Kota harus mendapatkan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang. Hingga kini, Kota Ternate dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang hak pelayanannya, mendapatkan pelayanan terhadap daya dukung lingkungan yang asri. Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang

dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Ternate, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak banjir yang diakibatkan drainase lingkungan yang kurang memadai dan tata kelola sampah perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh. Misi ini bertujuan untuk memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh; optimalnya tutupan lahan; optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; optimalnya cakupan layanan air bersih; optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan; optimalnya penataan sistem drainase dan optimalnya layanan transportasi perkotaan.

2.2.7 Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu

Misi ini bertujuan untuk melaksanakan tanggap darurat kerawanan bencana; melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan melakukan penanganan dan penanggulangan dampak covid-19, dengan sasaran optimalnya mitigasi dan tanggap darurat bencana serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait; optimalnya pemantauan resiko bencana dan penetapan sistem peringatan dini; optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan kebencanaan dan kawasan rawan bencana; optimalnya penanganan covid-19; optimalnya penanganan kemiskinan dan optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat.

2.2.8 Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya yang ada di kota Ternate, dengan sasaran optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial; optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dan optimalnya kota inklusif ramah disabilitas. Misi pembangunan Kota Ternate bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kunci dari sebuah kesuksesan misi pembangunan ialah

kolaborasi pada setiap PD. Selain itu, pentingnya konsep Pentahelix antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya, yang bertujuan mendukung secara optimal program-program yang populis dan inklusif sebagai bentuk pembangunan kualitas SDM, dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi di Kota Ternate.

2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka arah tujuan pembangunan Kota Ternate terkait dengan pernyataan Misi untuk kurun waktu pembangunan daerah periode tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Kota Ternate tahun 2021-2026 yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelayanan Publik

Sasaran 1 :Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate

Indikator : 1.Angka Partisipasi PAUD
2. Angka Putus Sekolah SD/MI
3. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
4. Rata - Rata Lama Sekolah

Sasaran 2 : Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (Smart Governance)

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 3 :Meningkatnya Kualitas Akses Pelayanan Kesehatan

Indikator : Angka Harapan Hidup

Sasaran 4 :Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan

Indikator : Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Keagamaan

Tujuan 2 : Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate

Sasaran 1 : Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas

Indikator : Indeks Aksesibilitas Sarana dan Prasarana yang Ramah terhadap Disabilitas dan Kelompok Rentan

Sasaran 2 : Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak

- Indikator** : 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Gender
3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak
- Tujuan 3** : **Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana**
- Sasaran** : **Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim**
- Indikator** : 1. Indeks Kerentanan Kota
2. Persentase Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)
- Tujuan 4** : **Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
- Sasaran 1** : **Optimalnya Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- Indikator** : Indeks SPBE
- Sasaran 2** : **Optimalnya Implementasi Manajemen ASN**
- Indikator** : Persentase Pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka
- Sasaran 3** : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**
- Indikator** : Nilai SAKIP
- Sasaran 4** : **Optimalnya Penerapan Zona Integritas**
- Indikator** : OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM
- Tujuan 5** : **Pemetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**
- Sasaran 1** : **Optimalnya Tutupan Lahan**
- Indikator** : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- Sasaran 2** : **Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta masih tingginya kawasan pemukiman kumuh**
- Indikator** : Pengurangan Luasan Kumuh
- Sasaran 3** : **Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
- Indikator** : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Sasaran 4** : **Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih**
- Indikator** : Rasio Akses Air Minum terhadap jumlah penduduk
- Sasaran 5** : **Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan**
- Indikator** : Persentase Layanan Persampahan
- Sasaran 6** : **Optimalnya Penataan Sistem Drainase**
- Indikator** : Luas Genangan Banjir dan Rob

- Sasaran 7 : Optimalnya Layanan Transportasi Perkotaan**
Indikator : 1. Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service)
 2. Persentase Keterhubungan Jalan
- Tujuan 6 : Menyediakan Lembaga Dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya**
- Sasaran 1 : Meningkatkan Intensitas Event Seni dan Budaya yang diselenggarakan**
Indikator : Jumlah Event Seni dan Budaya yang diselenggarakan
- Sasaran 2 : Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga**
Indikator : 1. Persentase OKP yang aktif
 2. Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi
- Sasaran 3 : Optimalnya Peran Lembaga Social Budaya– Kesuslataan Ternate**
Indikator : Persentase Lembaga Sosial Mandiri
- Tujuan 7 : Mengoptimalkan Laju Inflasi**
Sasaran : Optimalnya Pengendalian Inflasi
Indikator : Laju Inflasi
- Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**
Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9 : Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan yang seimbang**
Sasaran : Terciptanya kesimbangan pertumbuhan antar wilayah
Indikator : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana social ekonomi
- Tujuan 10 : Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana**
Sasaran 1 : Optimalnya Mitigasi, pemantauan resiko bencana dan penetapan sistem peringatan dini
Indikator : Ketersediaan Sistem Peringatan Dini
- Sasaran 2 : Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana**
Indikator : Tingkat pemahaman masyarakat tentang Kebencanaan
- Sasaran 3 : Optimalnya tanggap darurat bencana dan koordinasi antar Instansi terkait**

- Indikator** : Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- Tujuan 11** : **Menciptakan Lapangan Kerja**
- Sasaran** : **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**
- Indikator** : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Tujuan 12** : **Menyediakan sarana dan prasarana sektor Informal**
- Sasaran** : **Tersedianya sarana dan prasarana sektor informal**
- Indikator** : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
- Tujuan 13** : **Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Kinerja**
- Sasaran** : **Meningkatnya akuntabilitas keuangan**
- Indikator** : Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
- Tujuan 14** : **Mengoptimalkan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah**
- Sasaran** : **Meningkatnya akuntabilitas pendapatan daerah**
- Indikator** : Persentase Pendapatan daerah
- Tujuan 15** : **Melakukan Penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19**
- Sasaran 1** : **Optimalnya penanganan Covid-19**
- Indikator** : Persentase menurunnya pasien Covid-19
- Sasaran 2** : **Optimalnya penanganan kemiskinan**
- Indikator** : Persentase menurunnya kemiskinan
- Sasaran 3** : **Optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat**
- Indikator** : Pencapaian skor pola pangan harapan

Hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	1 Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang	1 Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	1 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi
		2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	2 Pertumbuhan Ekonomi
		3 Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi	3 Optimalnya Pengendalian Inflasi	3 Laju Inflasi
2	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif	4 Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Indeks SPBE
			5 Optimalnya Implementasi Manajemen ASN	5 Persentase Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka
			6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	6 Nilai SAKIP Kota
			7 Optimalnya Penerapan Zona Integritas	7 OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM
		5 Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja	8 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	8 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
		6 Mengoptimalkan Intensifikasi dan	9 Meningkatnya Akuntabilitas	9 Persentase Pendapatan

			Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Pendapatan Daerah		Daerah
3	Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	7	Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	10	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (Smart Governance)	10	Indeks Kepuasan Masyarakat
				11	Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate	11	Rata-Rata Lama Sekolah
						12	Angka Partisipasi PAUD
						13	Angka Putus Sekolah SD/MI
						14	Angka Putus Sekolah SD/MI
12	Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan	15	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Keagamaan				
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	16	Angka Harapan Hidup				
4	Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi)	8	Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya	14	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya – Kesultanan Ternate	17	Persentase Lembaga Sosial yang Mandiri

				15	Meningkatnya Intensitas Event Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	18	Jumlah Event Seni dan Budaya yang diselenggarakan
				16	Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	19	Persentase OKP yang aktif
						20	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi
5	Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi	9	Menciptakan Lapangan Kerja	17	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	21	Tingkat Pengangguran Terbuka
		10	Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal	18	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Sektor Informal	22	Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung
6	Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan	11	Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	19	Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh	23	Penurunan Luasan Kumuh
				20	Optimalnya Tutupan Lahan	24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
				21	Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	25	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				22	Optimalnya Cakupan	26	Rasio Akses Air Minum Terhadap

					Layanan Air Bersih		Jumlah Penduduk
7	Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu	12	Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana	23	Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	27	Persentase Layanan Persampahan
				24	Optimalnya Penataan Sistem Drainase	28	Luas Genangan Banjir dan Rob
				25	Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan	29	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service)
				30	Persentase Keterhubungan Jalan		
		26	Optimalnya Tanggap Darurat Bencana dan Koordinasi Antar Instansi Terkait	31	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		
		27	Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini	32	Ketersediaan Sistem Peringatan Dini		
13	Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana	28	Optimalnya Implementasi Peraturan Perundangundangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana	33	Tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan		
		29	Optimalnya Ketahanan Kota Terhadap	34	Persentase Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah		